

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Organisasi sektor publik di Indonesia mengalami perkembangan yang luar biasa dalam beberapa periode terakhir ini. Perkembangan yang terjadi tidak lepas dari pengaruh perkembangan era globalisasi yang terjadi saat ini. Kondisi ini semakin menguatkan Akuntabilitas atas organisasi pemerintahan. Salah satunya akuntabilitas finansial, Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pihak yang berkepentingan dan masyarakat sebagai bentuk transparansi.

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dapat diwujudkan melalui penyampaian laporan pertanggung jawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Kualitas informasi dalam laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap standar akuntansi dan didukung oleh sebuah sistem akuntansi yang handal. (Andini dan Yusrawati, 2015)

Sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahn Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan

pemerintah, baik pusat maupun daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang di hasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun komponen laporan keuangan yang di sampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Kuangan.(Nurillah, 2014)

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut (SAK, 2009). Menurut Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia 2009, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi. (Nurillah,2014)

Dalam Permendagri No. 59 Tahun 2007 menyatakan Laporan keuangan dikatakan relevan apabila laporan keuangan dapat menjadi pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan sangat penting bagi tingkat manfaat dan nilai laporan tersebut. Sehingga diperlukan adanya suatu sistem berbasis IT dalam menyusun suatu laporan keuangan. Adanya sistem keuangan daerah berbasis IT memungkinkan pengerjaan suatu laporan keuangan menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam mengelola keuangan daerah, pemerintah telah menggunakan sistem yang sesuai dengan PP Nomor 58 tahun 2005. Pengertian dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yaitu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Salah satu indikator kualitas laporan keuangan bisa dilihat dari opini auditor eksternal (BPK) atas penyajian laporan keuangan pemerintah yang *good governance*, salah satunya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang komponennya meliputi: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Opini BPK secara bertingkat terdiri dari: Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Sehingga jika indikator

terpenuhi maka diharapkan dapat terciptanya laporan keuangan yang berkualitas.

Dalam penelitian Sukmaningrum Tantriani (2012) menyatakan Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan.

Standar akuntansi pemerintahan merupakan acuan dalam menyusun laporan keuangan. Sehingga standar akuntansi keuangan merupakan faktor penting yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Apabila standar akuntansi pemerintahan telah dipahami maka akan dapat menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan dengan benar. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Kualitas laporan keuangan daerah yang baik akan berdampak pula pada tata kelola pemerintahan yang lebih baik. (Wati et al, 2014)

Penerapan standar akuntansi pemerintahan yang benar dan pemahaman yang baik terhadap akuntansi keuangan daerah oleh pengelola keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tentunya akan

meningkatkan kualitas laporan keuangan. Berbicara mengenai kualitas laporan keuangan selain menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan tidak terlepas juga diterapkannya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Prinsip penerapan standar akuntansi dalam tata kelola keuangan daerah yang baik merupakan suatu keharusan yang harus diterapkan diseluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Untuk menciptakan penerapan standar akuntansi dalam tata kelola keuangan daerah baik diperlukan penguatan sistem dan kelembagaan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu usaha untuk mewujudkan penerapan standar transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah adalah dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang mensyaratkan bentuk, isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun serta disajikan sesuai dengan penerapan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Dengan diterapkannya standar akuntansi pemerintahan yang baik, maka pemerintah daerah akan memiliki kualitas informasi yang baik, karena laporan keuangan pemerintah daerah harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (Udiyanti,2014). Dalam mengelola keuangan daerah, pemerintah daerah menggunakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan yang bertujuan untuk memberikan informasi dalam pertanggungjawaban penggunaan dana .(Andini dan Yusrawati ,2015)

Selain itu dalam penyusunan laporan keuangan juga diperlukan sistem akuntansi. Di mana untuk menghasilkan laporan keuangan daerah dibutuhkan suatu sistem akuntansi keuangan daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) merupakan suatu prosedur dari tahap awal pengumpulan data sampai pelaporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Permendagri No. 59 Tahun 2007). Jika sistem akuntansi belum dipahami maka akan dapat menghambat dalam penyusunan laporan keuangan. (Wati et al, 2014)

Dalam mengelola keuangan daerah, pemerintah daerah menggunakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan yang bertujuan untuk memberikan informasi dalam pertanggungjawaban penggunaan dana.

Sumber daya manusia adalah faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Keberhasilan suatu entitas bukan hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimilikinya melainkan kompetensi sumber daya manusia yang dimilikinya. Dalam hal ini kompetensi sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting

untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan. (Wati et al, 2014)

Untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kompetensi aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. Terbatasnya pegawai yang berlatar belakang pendidikan bidang akuntansi menjadikan kurangnya pemahaman/penguasaan aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar. (Andini dan Yusrawati, 2015)

Selanjutnya adalah faktor Komitmen Organisasi, Mowday, et.al (1979) dalam Maksyur (2015) , mendefinisikan komitmen organisasi sebagai tingkat kekuatan identifikasi individu, dan keterikatan individu kepada organisasi yang memiliki ketiga karakteristik. Pertama, memiliki kepercayaan yang kuat dan menerima nilai-nilai dan tujuan perusahaan. Kedua, kemauan yang kuat untuk berusaha atau bekerja keras untuk organisasi. Ketiga, keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi. Identifikasi dimaksud adalah pemahaman atau penghayatan terhadap tujuan organisasi. Keterikatan dimaksudkan adalah perasaan terlibat dalam suatu pekerjaan atau perasaan terlibat dalam suatu pekerjaan atau perasaan bahwa pekerjaan adalah menyenangkan. Dengan komitmen yang kuat akan memungkinkan seseorang bisa mengeluarkan sumber daya

fisik, mental dan spiritual tambahan yang bisa diperoleh, sebaliknya tanpa komitmen maka pekerjaan-pekerjaan besar akan sulit terlaksana.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang di lakukan oleh Andini dan Yusrawati (2015) yang berjudul Pengaruh sumber daya manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan menambah dua variabel yaitu Standar Akuntansi Pemerintah dan Komitmen organisasi dengan objek penelitian di Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan Latar belakang tersebut maka peneliti mengambil judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. (Studi Empiris Pada Dinas SKPD Pemerintah Kabupaten Sukoharjo).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ?
2. Apakah Sistem Akuntansi Keuangan Deaerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ?
3. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ?

4. Apakah Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ?

C. Tujuan penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah,peneliti ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Deaerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
4. Untuk Menguji dan menganalisis pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintahan

Memberikan wacana tentang pentingnya Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dan juga sebagai bahan masukan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan terutama pada satuan kerja pemerintah daerah.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti dan dapat lebih mengetahui Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambah wacana keilmuan.

E. Sistematika Penulisan

Suatu karya ilmiah memerlukan sistematika dalam penelitian yang baik, teratur dan terperinci. Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka penelitian dan pengembangan hipotesis.

BAB III: Metode Penelitian

Menguraikan tentang variabel penelitian dan definisi operasional penentuan populasi dan sampel, data dan sumber data, pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV: Analisis Data dan Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V: Penutup

Sebagai bab terakhir dari penelitian ini akan diuraikan simpulan yang merupakan penyajian singkat apa yang diperoleh dalam pembahasan. Dalam bab ini juga dimuat saran-saran dan keterbatasan berdasarkan hasil penelitian.